

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada negara yang berdasarkan undang-undang dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Ketentuan pemungutan pajak di atur dalam Pasal 23A Amendemen Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang” (Waluyo, 2010:4). Pajak itu sendiri merupakan Sumber penerimaan pendapatan Negara Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 yaitu tentang Keuangan Negara yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sumber penerimaan dan pendapatan negara di bagi menjadi dua yaitu sumber penerimaan pendapatan negara dari pajak dan juga sumber penerimaan pendapatan negara bukan pajak (BNBP). Pajak mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam penerimaan negara nonmigas. Pada beberapa tahun terakhir penerimaan dari sektor pajak mencapai lebih dari 70% - 80% dari total penerimaan dalam APBN. Berbagai kebijakan dibuat oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut berdampak pada masyarakat dan juga dunia usaha serta pihak-pihak lain sebagai pembayar/pemotong ataupun pemungut pajak. Pajak digunakan oleh pemerintah sebagai tanggung jawab kepada masyarakat untuk dan negara di segala sektor dalam rangka untuk

mencapai kesejahteraan umum. *Tax avoidance* merupakan salah satu upaya dalam perencanaan pajak yang bisa dilakukan secara legal. Tujuan dari penghindaran pajak ini untuk meminimalisir beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan.

Pada tahun 2016 munculnya Panama papers menghebohkan publik dunia. Pasalnya panama papers merupakan dokumen rahasia sebuah firma hukum yaitu Mossack Fonseca. Pada tahun 2016 dokumen panama papers bocor ke publik. Panama papers mengungkapkan bagaimana orang-orang kaya dan para pengusaha berupaya untuk menghindari pajaknya. Banyaknya para pengusaha dan elit politik yang masuk dalam daftar Panama Papers. Hal ini menunjukkan bahwa praktik penghindaran dan pengelakan pajak sudah menjadi ancaman bagi negara. Berdasarkan dokumen panama papers ada ribuan klien Mosack Fonseca, 800 klien diantaranya merupakan klien dari Indonesia.(indocropcircle). Pada tahun 2017 muncul bocoran dokumen dengan jumlah besar yang diberi kenal dengan Paradise Papers. *The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ)* pada Senin, 6 November 2017 mempublikasikan sebagian data dari paradise papers. Paradise papers ini merupakan kelanjutan dari panama papers. Tidak jauh berbeda dengan panama papers, paradise papers ini merupakan dokumen yang serupa dengan panama papers. Dalam paradise papers ini setidaknya ada 200 warga negara Indonesia yang masuk dalam daftar dan juga 15 perusahaan yang terlibat. Dokumen yang bocor tersebut merupakan dokumen rahasia dari dua firma yaitu yang menyediakan jasa layanan perusahaan offshore bernama Asiaciti trust dan Appleby. Paradise papers merupakan pembocoran dokumen dalam skala

besar oleh firma hukum yang mana dokumen tersebut mengungkapkan secara rinci mengenai aktivitas perpajakan para orang kaya. Banyaknya warga negara yang terlibat dalam panama papers dan juga paradise papers ini menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak masih banyak dilakukan. Munculnya dokumen tersebut memicu dugaan adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Dalam penyelidikan investigatif diungkapkan bahwa penyelidikan panama papers tersebut menilik adanya keterlibatan para elit politik, pengusaha papan atas, pimpinan pemerintahan dalam menyembunyikan harta kekayaan demi menghindari pembayaran pajak. Penghindaran pajak maupun pengelakan pajak dapat menghambat kemampuan negara dalam hal pemungutan pajak secara maksimal. Hal ini mengakibatkan tidak seimbangnya antara infrastruktur dan fasilitas yang diberikan oleh negara dengan penerimaan negara dalam pajaknya. Dalam hal ini negara harus berupaya untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak dan memberikan tindakan hukum yang tegas untuk menarik pajak yang telah di sembunyikan. Panama papers dan paradise papers telah menunjukan besarnya praktik penghindaran pajak yang terjadi, khususnya di Indonesia.

Good corporate governance pertama di perkenalkan pada tahun 1992 oleh *Cadbury commite*. Istilah tersebut digunakan dalam laporan mereka yang kemudian dikenal dengan *Cadbury report*. *Cadbury report* dipandang sebagai *turning point* bagi praktik *Good corporate governance* di seluruh dunia. *Good Corporate Governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dan menentukan bagaimana arah kinerja

kinerja sebuah perusahaan (Sabrina, 2010). Menurut *Indonesia institute for corporate governance* (IICG) (2009) *Good corporate governance* adalah suatu struktur atau proses yang diterapkan dalam menjalankan sebuah perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai pemegang saham dengan tetap memperhatikan *stake holders* berdasarkan peraturan yang ada. Pada tahun 1998 isu *Corporate governance* dimulai ketika Indonesia mengalami krisis moneter (Sabrina, 2010). Krisis moneter pada tahun 1998 yang terjadi di Indonesia mengakibatkan para investor asing meninggalkan bursa, dan para investor lokal saja yang bertahan di bursa. Oleh karena Indonesia mengalami titik terendah dalam pencapaian di bursa (Eirene, 2010). *Good corporate governance* ini menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang dapat menentukan arah kinerja perusahaan. Sedangkan perusahaan merupakan salah satu wajib pajak. *Good corporate governance* memiliki andil dalam perusahaan, seperti pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan tersebut termasuk keputusan dalam hal perpajakan sebagai salah satu wajib pajak. Disisi lain perusahaan juga melakukan perencanaan pajak, dimana perencanaan ini bergantung pada dinamika *good corporate governance* dalam suatu perusahaan.

Dalam rangka mengembangkan bisnis dan mempertahankan usahanya, perusahaan membutuhkan pendanaan dari pihak eksternal. Dengan menerbitkan surat utang yang nantinya akan dibeli oleh kreditor merupakan salah satu cara pendanaan yang biasanya dilakukan oleh perusahaan. kreditor akan menerima imbal hasil berupa bunga dengan membeli surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan. Bunga merupakan pengembalian yang harus diberikan oleh

perusahaan penerima utang atau pendanaan kepada kreditur. Pendanaan bagi sebuah perusahaan dapat berasal dari modal sendiri ataupun berasal dari hutang. Sumber dana yang digunakan oleh perusahaan akan mempengaruhi perhitungan pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Kebijakan pendanaan yang digunakan oleh perusahaan akan memberikan pengaruh pada besarnya tarif pajak yang dikenakan karena adanya perbedaan perlakuan yang terkait dengan struktur permodalan perusahaan. Salah satu indikator perusahaan melakukan penghindaran pajak atau tidak ialah dengan kebijakan pendanaan yang diambil oleh perusahaan. Perusahaan memanfaatkan *leverage* agar keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan lebih besar dari sumber dana dan biaya asetnya sehingga keuntungan para pemegang saham meningkat (Dharma dan Andriana 2016). *Leverage* (struktur modal) merupakan rasio besarnya utang perusahaan dalam membiayai aktivitas operasinya. Dengan semakin banyaknya utang perusahaan memunculkan beban bunga yang ditanggung oleh perusahaan. Komponen beban bunga yang harus di bayar oleh perusahaan akan mengurangi laba sebelum pajak sehingga pajak yang dibayarkan oleh perusahaan lebih rendah (Adeliana, 2012).

Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak, dimana pajak perusahaan tersebut dihitung berdasarkan laba bersih yang diperoleh perusahaan. Semakin besar laba bersih perusahaan, maka semakin besar pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan dengan itu maka pendapatan negara semakin banyak. Namun bagi perusahaan semakin besar pajak yang harus di bayarkan maka semakin besar beban perusahaan. Bagi perusahaan pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba bersih. Dalam hal ini terdapat perbedaan tujuan antara tujuan

negara dan tujuan perusahaan. Tujuan negara adalah untuk dapat memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak. Hal ini bertentangan dengan tujuan perusahaan, dimana perusahaan ingin meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan dengan mengefisiensikan beban pajak guna mendapatkan laba yang lebih besar demi kepentingan sang pemilik. Bagi perusahaan pajak merupakan biaya yang dapat mengurangi laba, sehingga diperlukan adanya strategi tertentu yang bisa meminimalkan pajak perusahaan. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan perusahaan dalam mengurangi pajaknya antara lain ; Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) merupakan upaya mengefisiensikan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang dan bersifat legal, Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) merupakan upaya untuk menghindari beban pajak dengan melanggar undang-undang perpajakan dan hal ini bersifat tidak legal, (Suandy, 2011:7 dalam Husnaini et al, 2013).

Darmawan dan Sukartha (2014) penelitian ini bertujuan untuk menentukan pengaruh *good corporate governance* dengan variabel tambahan *Leverage*, *Return On Assets*, dan Ukuran Perusahaan terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan masuk dalam peringkat CGPI periode 2010-2012 yang berjumlah 55 perusahaan menjadi sampel dalam penelitian ini. Penghindaran pajak dapat diukur dengan selisih antara laba komersial dengan laba fiskal kemudian dibagi dengan total aset perusahaan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa terdapat pengaruh antara Corporate Governance, ROA, dan ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak. Variabel leverage dalam penelitian ini tidak menunjukkan pengaruh pada penghindaran pajak. *Leverage*

tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. ROA berpengaruh pada penghindaran pajak. Dan ukuran perusahaan berpengaruh pada penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa *good corporate governance* memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan perusahaan termasuk dalam memenuhi kewajiban pajaknya sebagai wajib pajak.

Tresno Eka Jaya, et.al (2014) Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *good corporate governance* yang diukur dengan proksi kepemilikan saham institusional tidak berpengaruh terhadap praktek penghindaran pajak, ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak, kualitas audit tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Dan konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Vidiyanna & Bella, (2017) dalam penelitian ini menggunakan sample nonprobability sampling dengan teknik purpose sampling. Jumlah sampel sebanyak 34 perusahaan. Analisis data menggunakan teknik multiple linear analysis. menunjukkan bahwa leverage dan profitability memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance. Ukuran perusahaan dan proporsi kepemilikan berpengaruh positif dan signifikan.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan dari adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu dan juga fenomena yang telah terjadi mengenai penghindaran pajak (*tax avoidance*). Pada penelitian ini peneliti ingin menguji kembali dan memperkuat dari hasil penelitian - penelitian sebelumnya. Dengan mengembangkan penelitian-penelitian sebelumnya dan menggunakan variabel-variabel yang berbeda.

Pertama, sampel pada penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar dalam

pemeringkatan *good corporate governance* dikarenakan masih belum banyak penelitian yang menggunakan *score cgpi* dan adanya perbedaan dari hasil penelitian terdahulu terkait dengan pengujian pengaruh *Good Corporate Governance* dan *leverage* terhadap *tax avoidance*. Selain itu, alasan lain peneliti ialah belum banyak penelitian mengenai *good corporate governance* yang menggunakan *score* penerapan pemeringkatan *Good Corporate Governance* (*corporate governance perception index*) yang dilakukan oleh lembaga *Indonesia Institute for Corporate Governance*, yang menilai GCG dari semua elemen/indikator yang telah ditetapkan dan akan mendapatkan hasil akhir berupa skor dan kategori) untuk mengukur variabel *good corporate governance*.

Penelitian ini mengukur pengaruh *Good Corporate Governance* dan *leverage* terhadap penghindaran pajak. Masih banyaknya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia. Praktik penghindaran pajak ini dapat merugikan negara dari segi pajak sebagai sumber pendapatan utama negara .

Berdasarkan uraian latar belakang, dan dengan melihat pemaparan penelitian-penelitian terdahulu, terdapat perbedaan hasil yang diperoleh dari penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini mendorong kembali untuk meneliti **Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*.**

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini menggunakan *good corporate governance* dan *leverage* perusahaan sebagai variabel independen serta *tax avoidance* sebagai variabel dependen Berdasarkan uraian latar belakang penelitian dan uraian diatas, maka

perumusan rumusan permasalahan penelitian ini terfokus pada:

1. Apakah *good corporate governance* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar dalam pemeringkatan CGPI (*Corporate Governance Perception Index*)
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *Leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar dalam pemeringkatan CGPI (*Corporate Governance Perception Index*)

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini untuk:

1. Manfaat Akademik
 - a. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan terutama mengenai pengaruh *Good corporate governance* dan *leverage* terhadap penghindaran pajak
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran untuk penelitian selanjutnya, serta memberikan sumbangan gagasan sebagai pertimbangan dalam memberikan informasi tentang penghindaran pajak, *good corporate governance*, *leverage*.

2. Manfaat Praktik

a. Bagi pemerintah

Membantu penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengawasi praktik penghindaran pajak dan menanggulangi praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Sehingga dalam hal ini pemerintah, khususnya direktorat jendral pajak dapat mempertimbangkan dalam membuat kebijakan-kebijakan yang lebih baik agar perusahaan tidak bisa memanfaatkan celah (*loophless*) yang terdapat dalam peraturan Undang-undang perpajakan.

b. Bagi pemegang saham dan investor, penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan bagi investor dan pemegang saham perusahaan tentang karakteristik dari kinerja keuangan perusahaan yang memungkinkan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan mekanisme tatakelola perusahaan yang tepat sehingga dapat digunakan untuk mengontrol manajemen dan *good corporate governance* yang di ukur dan di nilai dari hasil pemeringkatan penerapan GCG (*good corporate governance*) berupa score CGPI (*Corporate Governance Perception Index*).

c. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada perusahaan sampel dan perusahaan pada umumnya mengenai hubungan *good corporate governance*, *leverage* dan penghindaran pajak.

d. Sebagai tambahan pengetahuan dan juga bukti empiris bagi literatur

akuntansi, sekaligus sebagai tambahan informasi, wawasan, dan referensi bagi akademisi mengenai pengaruh *good corporate governance* dan *leverage* terhadap penghindaran pajak.

